

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022



PRID Pembantu
Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2022 ini dapat selesai pada waktunya.

Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2022 dalam rangka memberikan gambaran keterbukaan informasi tentang kegiatan Teknis Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang telah dilaksanakan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2022.

Akhir kata mohon maaf yang sebesar-besarnya bilamana dalam laporan ini terdapat kekurangan serta kesalahan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Samarinda, Februari 2023

Ketua PPID

Ir. Hj. Zaina Yurda, M.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660912 199203 2 015



DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Lampiran		iii
PENDAHULUAN		1
A. Kebijakan Pelayanan		1
B. Pelaksanaan Pelayanan		4
1. Sarana dan Prasarana		4
2. Sumber Daya Manusia		6
3. Anggaran Pelayanan		7
C. Rincian Pelayanan		7
D. Rincian Penyelesaian Sengketa		9
E. Kendala Eksternal dan Internal		9
F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut		9
G. Penutup		10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1		11
SOP Permohonan Data		11
Lampiran 2		13
SK PPID Tahun 2023		13

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan tugas pokok, fungsi dan tata kerjanya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008. Sesuai Perda tersebut, tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah khususnya di Bidang Kehutanan berdasarkan asas Otonomi dan tugas Pembantuan serta tugas Dekonsentrasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kehutanan.
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan dan tata guna hutan.
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi dan pemanfaatan hutan.
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Peredaran dan industri hasil hutan.
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pembinaan perlindungan hutan.
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, adalah tugas pokok dan fungsi yang melekat dan tanggung jawab Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh :

1. Sekretariat
2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
3. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem
4. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Lahan
5. Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Serta Kepala UPTD KPHP Dinas Kehutanan, diantaranya :

1. KPHP Santan
2. KPHP Meratus
3. KPHP Bongan
4. KPHP Bengalon
5. KPHP Kendilo
6. KPHP Berau Barat
7. KPHP Batu Ayau
8. KPHP Sub Das Belayan
9. KPHP Telake
10. KPHP Manubar
11. KPHP Mook Manoor Bulatn
12. KPHP Kelinjau
13. KPHP Delta Mahakam
14. KPHP Damai
15. KPHP Berau Utara
16. KPHP Berau Tengah
17. KPHP Berau Pantai
18. KPHL Balikpapan
19. KPHL Batu Rook
20. Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto

Setiap satuan kerja perangkat dinas (SKPD) memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang fungsinya mengelola data dan informasi mengenai masing-masing SKPD.

Sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, PPID mempunyai peran yang sangat strategis dalam konteks penyediaan data dan informasi kehutanan, database Kehutanan, media informasi (*Website*), Sinkronisasi data dan peta serta sistem aksesibilitas terhadap data dan informasi. Amanah dan peran strategis PPID tersebut telah menjadikan salah satu prioritas pengembangan data dan informasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Prioritas tersebut telah diterjemahkan dalam program peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan sistem informasi kehutanan dengan kegiatan pengembangan sistem koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, meliputi data informasi kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur, kegiatan dan perkembangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur maka perlu disusun laporan layanan informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap ada permohonan data dan informasi yang diajukan di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur akan dilayani dengan baik. Permohonan data dan informasi yang ditujukan kepada setiap bidang Dinas Kehutanan akan diteruskan kepada PPID. Bagi Pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan data dan informasinya dapat mendatangi ruang Layanan Informasi atau ruangan PPID Dinas Kehutanan dengan syarat membawa surat pengantar/resmi dan permohonan data bisa melalui online yang telah tersedia di website Dinas Kehutanan.



Alur Permohonan Informasi Publik

Selain memberikan layanan data dan informasi atas dasar permintaan, Dinas Kehutanan juga secara aktif memberikan layanan data dan informasi mengupload data dan informasi secara berkala. Situs resmi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur <https://dishut.kaltimprov.go.id/file-kehutanan> menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik yang wajib disediakan dan diupload di situs website secara berkala.

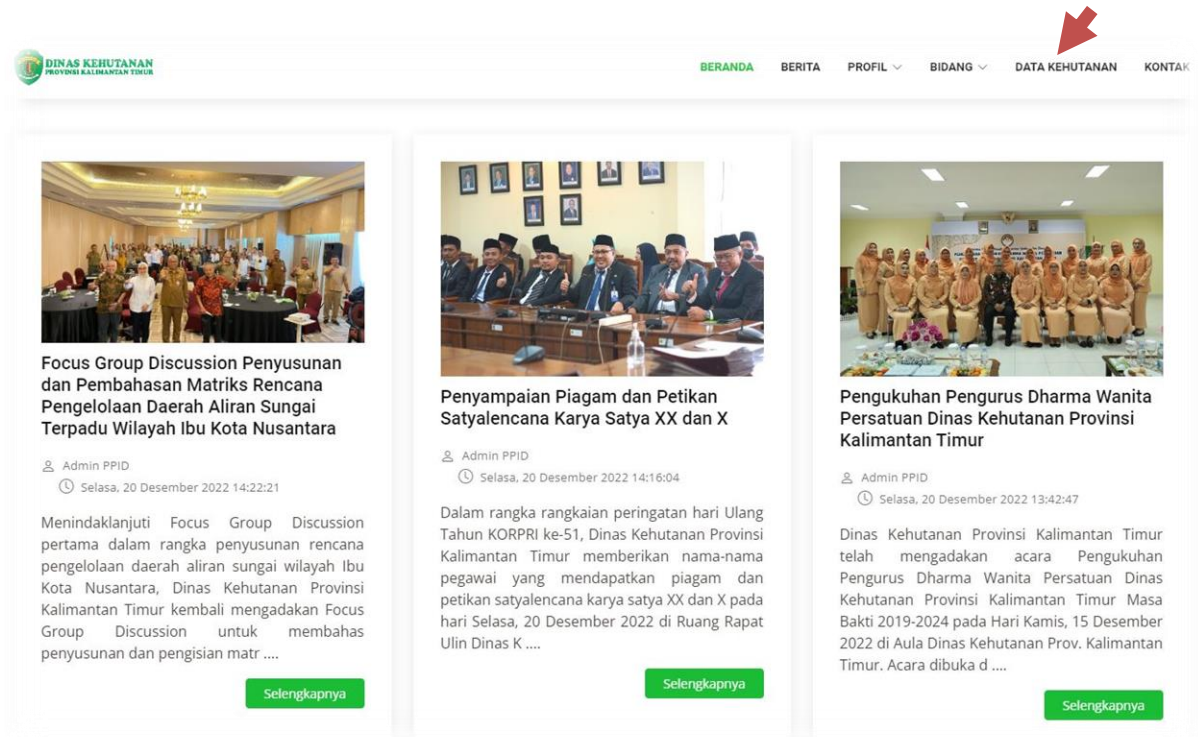
Operasional layanan informasi publik yang dilaksanakan di ruang Layanan Informasi atau ruangan PPID dimulai pada pukul 08.00 WITA s.d 16.30 WITA. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan permintaan data dan informasi dengan berbagai sarana komunikasi diantaranya menggunakan formulir permohonan data secara online yang tersedia di *website* dan email dishut.ppid@gmail.com yang terdapat di website tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Kehutanan.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik PPID Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyediakan ruangan yang berisi 4 meja, 4 kursi staf dan 3 kursi tamu, 3 PC Desktop All In One dan 1 Laptop. Ruangan ini dilengkapi 1 AC, akses internet dan 2 rak lemari besar untuk menyimpan buku-buku tentang yang berhubungan dengan bidang kehutanan.



Foto Ruang Layanan Informasi Publik

Data-data yang terkumpul juga dapat di akses melalui website resmi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu <https://dishut.kaltimprov.go.id/file-kehutanan> pada bagian menu **DATA KEHUTANAN** seperti pada gambar dibawah ini :



Laman website resmi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

2. Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi PPID di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melibatkan sumber daya manusia sebanyak 3 orang yang bertugas melayani permintaan data dan informasi dengan kualifikasi yang membidangi komunikasi, kehumasan, teknisi jaringan komputer, layanan data dan informasi.

Guna menjaga data tetap update secara rutin staf PPID meminta data setiap bidang-bidang di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur agar saling koordinasi data yang telah di perbaharui.

3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pelayanan informasi publik di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di bebaskan dalam Rencana Kerja Anggaran DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama Tahun 2022 PPID Pembantu Dinas Kehutanan menerima 20 (dua puluh) permohonan data dan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat dan instansi antara lain dari Instansi Pemerintah, mahasiswa, Akademisi, LSM dan Media Online.

Permohonan data dan informasi waktu yang diperlukan atau dikabulkan selama 5 hari kerja. Permohonan data dan informasi yang dikabulkan sebanyak 20 Permohonan, tidak ada permohonan ditolak.

Tabel Rincian Permohonan Informasi Publik

No	Siapa yang meminta	Data apa yang diminta	Data apa yang diberikan	Permintaan data yang ditolak
1.	BPS Kab. Penajam Paser Utara	Produksi Kayu Bulat Tahun 2021 Produksi Kayu Olahan Tahun 2021	Produksi Kayu Bulat Tahun 2021 Produksi Kayu Olahan Tahun 2021	Tidak Ada
2.	BPS Kab. Berau	Produksi Kayu Bulat Tahun 2021 Produksi Kayu Olahan Tahun 2021	Produksi Kayu Bulat Tahun 2021 Produksi Kayu Olahan Tahun 2021	Tidak Ada
3.	BPS Prov. Kaltim	Luas Kawasan Hutan Jumlah Hutan Alam Jumlah HTI Jumlah Rehabilitasi Per Kabupaten Produksi Kayu Olahan Tahun 2021	Luas Kawasan Hutan Jumlah Hutan Alam Jumlah HTI Jumlah Rehabilitasi Per Kabupaten Produksi Kayu Olahan Tahun 2021	Tidak Ada
4.	BPS Kab. Kukar	Produksi Kayu Bulat Tahun 2021 Luas Kawasan Hutan Kab. Kukar	Produksi Kayu Bulat Tahun 2021 Luas Kawasan Hutan Kab. Kukar	Tidak Ada
5.	Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim	Data Pemuktakhiran Jenis Produk Layanan	Data Pemuktakhiran Jenis Produk Layanan	Tidak Ada
6.	BPS Prov. Kaltim	Direktori Perusahaan Kehutanan Direktori Usaha Pertanian Kehutanan Non Rumah Tangga	Direktori Perusahaan Kehutanan Direktori Usaha Pertanian Kehutanan Non Rumah Tangga	Tidak Ada
7.	Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur	1. Realisasi Produksi Kayu Bulat (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Alam (IUPHHK HA) Triwulanan Data Kehutanan Tahun 2022 2. Realisasi Hutan Hak / Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), IPPKH, HGU dan Perorangan Triwulanan Data Kehutanan	1. Realisasi Produksi Kayu Bulat (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Alam (IUPHHK HA) Triwulanan Data Kehutanan Tahun 2022 2. Realisasi Hutan Hak / Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), IPPKH, HGU dan Perorangan Triwulanan Data Kehutanan	Tidak Ada

		Tahun 2022 3. Realisasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri (IUPHHK HTI), HTR dan HKm Triwulanan Data Kehutanan Tahun 2022 4. Jenis Kayu Bulat dan Produksi Triwulanan Data Kehutanan Tahun 2022 5. Jenis Kayu Olahan dan Produksi Triwulanan Data Kehutanan Tahun 2022 6. Produksi Hasil Hutan Non Kayu Triwulanan Data Kehutanan Tahun 2022 7. Jumlah Perusahaan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI Tahun 2021 8. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Per Kabupaten/Kota Tahun 2021 9. Luas Lahan Rehabilitasi dan Reboisasi Tahun 2017-2021 10. Produksi Kayu Olahan Menurut Jenis nya Per Kabupaten/Kota Tahun 2021	Tahun 2022 3. Realisasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri (IUPHHK HTI), HTR dan HKm Triwulanan Data Kehutanan Tahun 2022 4. Jenis Kayu Bulat dan Produksi Triwulanan Data Kehutanan Tahun 2022 5. Jenis Kayu Olahan dan Produksi Triwulanan Data Kehutanan Tahun 2022 6. Jumlah Perusahaan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI Tahun 2021 7. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Per Kabupaten/Kota Tahun 2021 8. Luas Lahan Rehabilitasi dan Reboisasi Tahun 2017-2021 9. Produksi Kayu Olahan Menurut Jenis nya diatas 6000 dan dibawah 6000 Per Kabupaten/Kota Tahun 2021	
8.	Sekda Pemkot Samarinda	Data Sektoral Kehutanan	Data Sektoral Kehutanan	Tidak Ada
9.	KOREM VI Mulawarman 091/ASN	Luas Hutan Produksi Kehutanan Tahun 2021 Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan	Luas Hutan Produksi Kehutanan Tahun 2021 Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan	Tidak Ada
10.	P3E Kalimantan KLHK	Lokasi Rehabilitasi Hutan Lahan SDM dan Anggaran Sebaran Titik Hotspot	Lokasi Rehabilitasi Hutan Lahan SDM dan Anggaran Sebaran Titik Hotspot	Tidak Ada
11.	Sekda Prov. Kaltim	Data Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Data Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Tidak Ada
12.	Kantor Pelayanan Pajak Kab. Berau	Produksi Kayu Bulat Kab. Berau Tahun 2021	Produksi Kayu Bulat Kab. Berau Tahun 2021	Tidak Ada
13.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kukar	Produksi Kayu Bulat Tahun 2021 Produksi Kayu Olahan Tahun 2021	Produksi Kayu Bulat Tahun 2021 Produksi Kayu Olahan Tahun 2021	Tidak Ada
14.	PATTIRO	Dokumen Renja Tahun 2019-2022	Dokumen Renja Tahun 2019-2022	Tidak Ada
15.	Sekda Prov. Kaltim	Data Penyerapana Tenaga Kerja pada Bidang Kehutanan	Data Penyerapana Tenaga Kerja pada Bidang Kehutanan	Tidak Ada
16.	UGM Pusat Studi Transportasi dan Logistik	Produksi Kehutanan	Produksi Kehutanan	Tidak Ada
17.	Dinas Perindakop UKM Prov. Kaltim	Pelaksanaan Program Pembangunan Industri Primer	Pelaksanaan Program Pembangunan Industri Primer	Tidak Ada

18.	Fakultas Kehutanan Unmul	Data Pengukuran IHMB PT. Inhutani I UMH Meraang di Kab. Berau	Data tidak ada	Tidak Ada
19.	Polres Kab. Kukar	Data Luas Hutan Data HPH Wilayah Kab. Kukar Data IPK Wilayah Kab. Kukar Data Perusahaan IPPK Wilayah Kab. Kukar Data Sawmil Wilayah Kab. Kukar	Data Luas Hutan Data HPH Wilayah Kab. Kukar Data IPK Wilayah Kab. Kukar Data Perusahaan IPPK Wilayah Kab. Kukar Data Sawmil Wilayah Kab. Kukar	Tidak Ada
20.	Kantor Pelayanan Pajak Kab. PPU	Data IUPHHK Hutan Alam dan Produksi Hasi Hutan Alam Wilayah Provinsi Kaltim	Data IUPHHK Hutan Alam dan Produksi Hasi Hutan Alam Wilayah Provinsi Kaltim	Tidak Ada

Keterangan :

HA	Hutan Alam
HTI	Hutan Tanam Industri
RKT	Rencana Kerja Tahunan
HCV	High Conservation Value
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan
IUPHHK	Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
IUIPHHK	Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
IPK	Ijin Pemanfaatan Kayu

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama Tahun 2022 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menerima keberatan dan gugatan tentang permintaan data dan informasi dari pihak luar.

E. Kendala Eksternal dan Internal

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

- A. Dalam memenuhi permohonan informasi diperlukan koordinasi dan kerja sama dengan Unit Kerja yang terkait permohonan informasi tersebut. Sehingga pelaksana PPID harus aktif untuk mendapatkan jawaban terhadap permohonan informasi.
- B. Sinergi antara pengelola layanan informasi publik dengan Unit Kerja masih kurang aktif.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

- A. Sosialisasi lebih ditingkatkan lagi bagi Unit-unit Teknis di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- B. Pengembangan aplikasi pengelolaan database informasi PPID Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- C. Pembangunan sistem administrasi layanan informasi publik berbasis website.
- D. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan meningkatkan jejaring layanan informasi di Lingkungan UPTD KPHP/KPHL/TAHURA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

G. Penutup

Laporan layanan informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ini adalah untuk memberikan gambaran tentang penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan perkembangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan mengakomodir amanah tentang keterbukaan informasi. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang terbaru, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh data dan informasi tentang kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

 DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	NOMOR SOP	01/DK-I/PPID/2021
	TGL. PEMBUATAN	13 Oktober 2021
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA  H. AMRULLAH NIP. 19611214 198703 1 010
	NAMA SOP	: SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PERKI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Surat Keputusan Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Tahun 2021		1. Memahami Tentang Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi 2. Memahami Tentang Pelayanan Informasi Publik
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP Pelayanan Informasi Publik		Formulir Permohonan Informasi dan Softcopy Permohonan Informasi Perangkat Keras (<i>Hardware</i>): Laptop, Printer, Pulpen dan Buku
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDAPATAN :
Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi adalah salah satu tugas dari PPID Pembantu Dinas Kehutanan Prov. Kaltim		Dokumen Formulir Permohonan Informasi

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Atasan PPID	PPID	Tim Pertimbangan	Syarat	Waktu	Output	
1	Menerima Permohonan Informasi Dari Pemohon	<pre>graph TD; Mulai([Mulai]) --> J1(()); J1 --> J2(()); J1 --> J3(()); J1 --> J4(()); J4 --> P1[Proses]; P1 --> P2[Proses]; P2 --> Selesai([Selesai]);</pre>			Surat/formulir permohonan informasi	15 Menit	Surat/formulir permohonan informasi telah terisi	Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 Bab VI Pasal 21 & 22
2	Memberikan Tanda Bukti Atas Permohonan Informasi Dan Mencatat Permohonan Informasi Ke Dalam Buku Register Layanan Informasi Publik				Formulir Permohonan Informasi	15 Menit	Nomor Register dan lembar disposisi PPID	
3	Menyampaikan Permohonan Informasi Kepada PPID				Buku Register	10 Menit	Disposisi	
4	Melakukan Koordinasi Untuk Menyusun Jawaban Atas Permohonan Informasi				Disposisi	3 s/d 5 Hari	Draft Jawaban Permohonan Informasi Publik	
5	Menandatangani Jawaban Atas Permohonan Informasi				Jawaban Permohonan Informasi Publik	1 hari	Jawaban Permohonan Informasi Publik	

